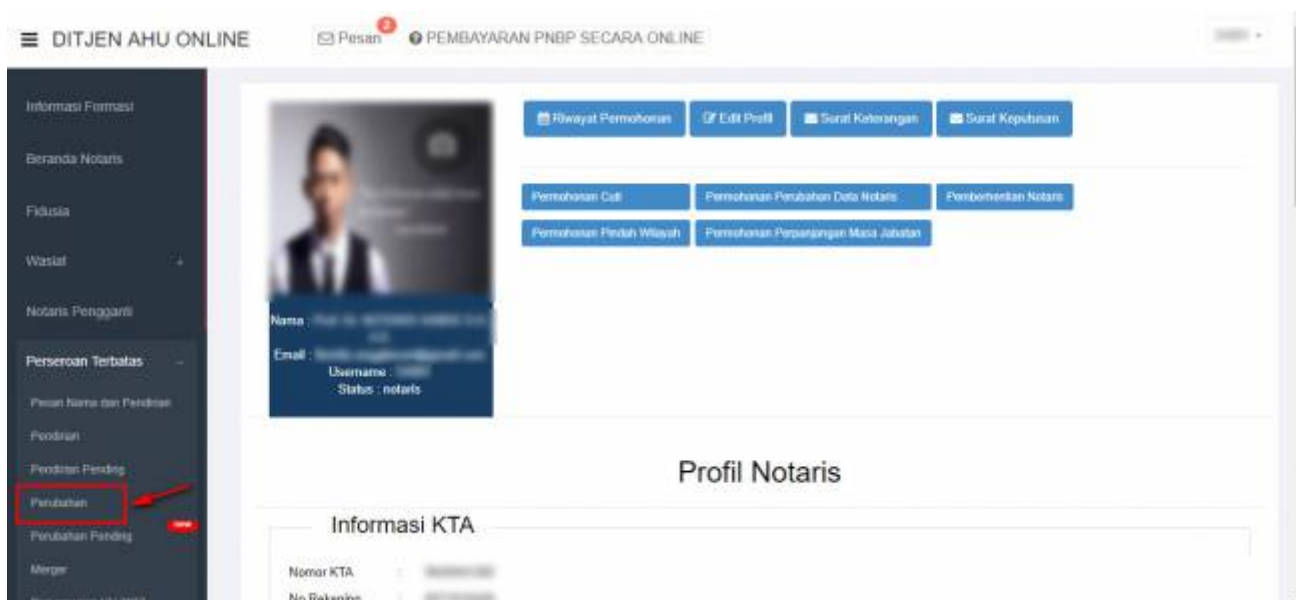


6. Perubahan

a. Pemilihan Menu

Menu Perubahan digunakan oleh Notaris untuk melakukan input data perubahan suatu PT (Perseroan Terbatas).

- Untuk mengakses menu ini klik menu **Perseroan Terbatas** → **Perubahan** seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



- Kemudian tampil halaman **Permohonan Perubahan Perseroan** dibawah ini.

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
 NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
 NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
 NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NAMA PERSEROAN *

NOMOR SK TERAKHIR *
Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

NOTARIS TERAKHIR *
Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

b. Voucher

Pada halaman Permohonan Perubahan Perseroan terdapat fitur untuk memesan nomor *voucher* perubahan perseroan sekaligus dengan beberapa ketentuan, diantaranya :

- Jika ingin memesan **nomor voucher point 1 sampai 3**, maka akan muncul *field* nomor voucher sesuai yang dipilih dan **otomatis point 4 disable atau tidak bisa dipilih** seperti gambar dibawah ini.

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
 NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
 NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
 NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

<p>NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN</p> <p>NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN</p> <p>NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PI</div> <p>i Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</div> <p>i Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN</div> <p>i Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jika ingin memesan **nomor voucher point 1 dan 4**, maka akan muncul *field* nomor voucher sesuai yang dipilih dan **otomatis point 2 dan 3 disable atau tidak bisa dipilih** seperti gambar dibawah ini.

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
 NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
 NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
 NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

<p>NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN</p> <p>NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PI</div> <p>i Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</div> <p>i Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik disini untuk pembelian voucher.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Voucher Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Untuk melakukan pemesanan Nomor Voucher Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

1. Ceklist **Nomor Voucher Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**
2. Lalu tampil kolom pengisian Nomor Voucher

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGAR.

i Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

- 3. Klik **disini**
- 4. Kemudian tampil *form* **Pemesanan Nomor Voucher Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

Cek Nomor VoucherDaftar VoucherKonfirmasi PembayaranKonsultasi PembayaranSudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar Rp 1.000.000, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan


Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklist *disclaimer* dan klik tombol BELI, lalu tampil *form* **Bukti Pemesanan Nomor Voucher**

DITJEN AHU ONLINE Pesan PEMBAYARAN PNPB SECARA ONLINE SABH

Cek Pemesanan Voucher List Voucher



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
BADAN HUKUM
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

KODE VOUCHER	:	-
BILL ID ^[1]	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NAMA PEMOHON	:	PERSEROAN TERBATAS
NOMOR REKENING	:	XXXXXXXXXX
EMAIL PEMOHON	:	XXXXXXXXXX@XXXXXX.CO
NOMOR HP	:	XXXXXXXXXX
TANGGAL TRANSAKSI	:	21 Agustus 2021 12:00:00
TANGGAL EXPIRED	:	21 Agustus 2021 12:00:00
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	:	
TAGIHAN	:	Rp 1.000.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Download Kirim Ulang

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**
- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol List Voucher, maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi: Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID:

Pelayanan Jasa Hukum:

Status:

Cari

* Keterangan :
1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 960 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas	21 Agustus 2021	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	<a>Lihat <a>Lanjutkan Transaksi

- Klik Lanjutkan Transaksi untuk menampilkan halaman **Permohonan Perubahan Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

820

ⓘ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Peretujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

2) Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Untuk melakukan pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

1. Ceklist **Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**
2. Lalu tampil kolom pengisian Nomor Voucher

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGG/

ⓘ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

3. Klik [disini](#)
4. Kemudian tampil *form* **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Cek Nomor VoucherDaftar VoucherKonfirmasi PembayaranKonsultasi PembayaranSudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

--PILIH--

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

BELI

Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar**

Perseroan terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu :

- PILIH--
- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

• Kemudian pilih **Modal Dasar** untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Cek Nomor Voucher Daftar Voucher Konfirmasi Pembayaran Konsultasi Pembayaran Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

NAMA PEMOHON *
EMAIL PEMOHON *
NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar Rp 150.000, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.
Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklist *disclaimer* dan klik tombol **BELI**
- Maka tampil *form* **Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

Daftar Voucher

[Riwayat Transaksi](#)

Tanggal Transaksi: Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID:

Pelayanan Jasa Hukum: -- SEMUA --

Status: -- SEMUA --

[Cari](#)

*** Keterangan :**

- 1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
- 2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
- 3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
- 4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1121 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1			Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas		Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Perubahan Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

! Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

3) Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

Untuk melakukan pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

1. Ceklist **Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan**
2. Lalu tampil kolom pengisian Nomor Voucher

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

! Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

3. klik [disini](#)
4. Kemudian tampil form **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data**

Perseroan Terbatas

Cek Nomor Voucher Daftar Voucher Konfirmasi Pembayaran Konsultasi Pembayaran Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas

--PILIH--

NAMA PEMOHON * [REDACTED]

EMAIL PEMOHON * [REDACTED]

NOMOR HP * [REDACTED]

BELI

Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas** terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu :

- PILIH--
- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

- Kemudian pilih **Modal Dasar** untuk Perubahan Data Perseroan Terbatas

Cek Nomor Voucher Daftar Voucher Konfirmasi Pembayaran Konsultasi Pembayaran Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ▼

NAMA PEMOHON * [REDACTED]

EMAIL PEMOHON * [REDACTED]

NOMOR HP * [REDACTED]

Pembelian voucher sebesar **Rp 150.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.


Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNBPN yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklist *disclaimer* dan klik tombol **BELI**
- Maka tampil *form* **Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas**

Cek Pemesanan Voucher **List Voucher**



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	: -
BILL ID ^[1]	: [blurred]
NAMA PEMOHON	: [blurred]
NOMOR REKENING	: [blurred]
EMAIL PEMOHON	: [blurred]
NOMOR HP	: [blurred]
TANGGAL TRANSAKSI	: 18 Agustus 2019 10:30:00
TANGGAL EXPIRED	: 21 Agustus 2019 23:59:59
(PEMBAYARAN TERAKHIR)	
TAGIHAN	: Rp 150.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	: BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

[Download](#) [Kirim Ulang](#)

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**.
- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol **List Voucher**, maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

[Riwayat Transaksi](#)

Tanggal Transaksi: Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID:

Pelayanan Jasa Hukum:

Status:

*** Keterangan :**

- 1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
- 2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
- 3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
- 4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1122 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas	<input type="text"/>	Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi 

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Perubahan Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

! Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

4) Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan

Untuk melakukan pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan dapat dilakukan dengan cara :

1. Ceklist **Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan**
2. Lalu tampil kolom pengisian Nomor Voucher

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

MASUKKAN NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGG/

i Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

- 3. Klik **disini**
- 4. Kemudian tampil *form* **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dan Data Perseroan Terbatas**

Cek Nomor Voucher Daftar Voucher Konfirmasi Pembayaran Konsultasi Pembayaran Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

--PILIH--

NAMA PEMOHON * [REDACTED]

EMAIL PEMOHON * [REDACTED]

NOMOR HP * [REDACTED]

BELI

Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dan Data Perseroan Terbatas** terdapat pilihan Modal Dasar, yaitu

- PILIH--
- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)
- Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

- Kemudian pilih **Modal Dasar** untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

Cek Nomor Voucher Daftar Voucher Konfirmasi Pembayaran Konsultasi Pembayaran Sudah Punya Voucher

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas

- Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

NAMA PEMOHON * [input field]

EMAIL PEMOHON * [input field]

NOMOR HP * [input field]

Pembelian voucher sebesar Rp 150.000, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.


Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNPB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol **BELI**
- Maka tampil *form* **Bukti Pemesanan Nomor Voucher Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dan Data Perseroan Terbatas**

Cek Pemesanan Voucher **List Voucher**



DIREKTORAT JENDERAL AHU
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas dan Data Perseroan Terbatas
 Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER : -
 BILL ID^[1] : -
 NAMA PEMOHON : -
 NOMOR REKENING : -
 EMAIL PEMOHON : -
 NOMOR HP : -
 TANGGAL TRANSAKSI : -
 TANGGAL EXPIRED : -
 (PEMBAYARAN TERAKHIR)
 TAGIHAN : Rp 150.000 / Voucher
 STATUS PEMBAYARAN : **BELUM BAYAR**

*** Keterangan :**
 1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
 2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Kirim Ulang

Download

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**.

- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol **List Voucher**, maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi

Dari

Sampai

Kode Voucher/Bill ID

Pelayanan Jasa Hukum

-- SEMUA --

Status

-- SEMUA --

Cari

*** Keterangan :**
 1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
 2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
 3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
 4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 1011 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1	-	-	Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Data Perseroan Terbatas	-	Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik [Lanjutkan Transaksi](#) untuk menampilkan halaman **Permohonan Perubahan Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

820 [REDACTED]

• Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik [disini](#) untuk pembelian voucher.

c. Pengisian data terakhir Perseroan

- Kemudian lakukan pengisian data pada halaman **Permohonan Perubahan Perseroan** dengan mengisi
 - **Nama Perseroan**
 - **Nomor SK Terakhir**
 - **Notaris Terakhir**
 - Lalu klik tombol Cari

Informasi PNBP:

Kami memohon maaf. Terjadi kesalahan penginputan penagihan PNBP. Sistem sudah diperbaiki, bagi Notaris yang telah mencetak Tagihan, harap mencetak ulang.

Perincian PNBP sbb:

- 1. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Persetujuan Menteri
 - Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan Rp. 1.000.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
- 2. Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Pemberitahuan
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
- 3. Perubahan data Perseroan harus bayar

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

820

i Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

820

i Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN *

NOMOR SK TERAKHIR *

AHU

Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

NOTARIS TERAKHIR *

i Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Cari



d. Pengisian Persyaratan Utama Perubahan

- Setelah itu tampil halaman **Persyaratan Utama Perubahan**

Informasi PNBP:
Kami memohon maaf. Terjadi kesalahan penginputan penagihan PNBP.
Sistem sudah diperbaiki, bagi Notaris yang telah mencetak Tagihan, harap mencetak ulang.

- Perincian PNBP sbb:
- Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Persetujuan Menteri
 - Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan Rp. 1.000.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
 - Perubahan Anggaran Dasar PT yang memerlukan Pemberitahuan
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Berita Negara Republik Indonesia(BNRI) Rp. 30.000,-
 - Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia(TBNRI) Rp. 550.000,-
 - Perubahan data Perseroan harus bayar

PERMOHONAN PERUBAHAN PERSEROAN

- NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
- NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

NOMOR VOUCHER PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

ⓘ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NOMOR VOUCHER PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN DATA PERSEROAN

ⓘ Nomor voucher yang digunakan adalah untuk Pemberitahuan Perubahan Anggota Dasar Perseroan Dan Data Perseroan, klik **disini** untuk pembelian voucher.

NAMA PERSEROAN

NOMOR SK TERAKHIR

Nomor SK merupakan Nomor Surat Keputusan Menteri. Bukan Nomor Surat Pemberitahuan.

NOTARIS TERAKHIR

ⓘ Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.

Cari

NOMOR SK TERAKHIR: AHU.0000000.0000.0000.0000.0000

NAMA	JABATAN
PT	DIREKTUR
MASYARAKAT	BADAN HUKUM
PEMERINTAH	
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	KOMISARIS

Persyaratan Utama

- Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)
- RUPS
- Akta Notaris dalam bahasa Indonesia
- Tanggal RUPS / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat
- Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat
- NPWP

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

LANJUTKAN

- Ceklis Persyaratan Utama
- Ceklis disclaimer
- Klik tombol **LANJUTKAN** maka muncul popup disclaimer



- Kemudian klik tombol **Saya Yakin** lalu masuk ke halaman **Permohonan Perubahan Ringkasan Perseroan**.

e. Pengisian Ringkasan Perseroan

Permohonan Perubahan PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED]

Ringkasan Perseroan

Jenis Perseroan: PMA
Status Perseroan: Tertutup

Jenis Perubahan

- Persetujuan perubahan anggaran dasar ⓘ
- Pemberitahuan perubahan anggaran dasar ⓘ
- Pemberitahuan perubahan data Perseroan ⓘ

Akta Notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.

Nama Notaris: [REDACTED]

Nomor Akta: [REDACTED] Tanggal Akta: [REDACTED] Tambah

Tanggal RUPS / Berita Acara / Notulen Rapat

Tanggal: [REDACTED]

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kehadiran RUPS	NAMA	JABATAN
<input checked="" type="checkbox"/>	[REDACTED]	DIREKTUR
<input type="checkbox"/>	PT [REDACTED]	BADAN HUKUM
<input checked="" type="checkbox"/>	MASYARAKAT [REDACTED]	
<input checked="" type="checkbox"/>	PEMERINTAH	
<input type="checkbox"/>	[REDACTED]	KOMISARIS
<input type="checkbox"/>	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya

KEMBALILANJUTKAN

Pada halaman **Permohonan Perubahan Ringkasan Perseroan** akan tampil menu fitur untuk jenis perubahan yang diantaranya ialah :

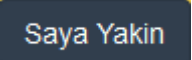
1. Jenis Perubahan yang telah otomatis tercekis terdiri dari 3 bagian diantaranya (Sesuai dengan

pengisian voucher di awal transaksi) :

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.
 - Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar.
 - Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.
2. Masukkan Nomor Akta notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.
 3. Masukkan Tanggal Akta notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.
 4. Masukkan Tanggal RUPS/Berita Acara Rapat/Notulen Rapat yang disesuaikan dengan akta PT.
 5. Ceklist Kehadiran RUPS pada Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
 6. Masukkan jumlah masyarakat yang hadir dalam RUPS
 7. Ceklist jika notaris memberikan semua informasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Klik tombol  maka akan keluar alert perhatian!!!



- Klik tombol  akan masuk ke halaman **Permohonan Perubahan**

f. Pilihan Jenis Perubahan

Permohonan Perubahan

PT BERSI INDIKORBARA

Silahkan pilih jenis perubahan yang di inginkan:

Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri

- Nama
- Tempat kedudukan
- Maksud dan tujuan serta kegiatan
- Jangka waktu
- Peningkatan Modal dasar
- Pengurangan Modal dasar
- Pengurangan modal ditempatkan dan disetor
- Status Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

- Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor
- Jenis Perseroan
- Pasal 1 ayat 1
- Pasal 1 ayat 2
- Pasal 4 ayat 1
- Pasal 4 Ayat 2
- Pasal 4 ayat 3
- Pasal 4 ayat 4
- Pasal 4 ayat 5
- Pasal 4 ayat 6
- Pasal 4 ayat 7
- Pasal 4 ayat 8
- Pasal 4 ayat 9
- Pasal 4 ayat 10
- Pasal 4 ayat 11
- Pasal 4 ayat 12
- Pasal 4 ayat 13
- Pasal 4 ayat 14
- Pasal 4 ayat 15
- Pasal 5
- Pasal 6
- Pasal 7
- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10
- Pasal 11
- Pasal 11 ayat 3
- Pasal 11 ayat 2.a(4)
- Pasal 12
- Pasal 13
- Pasal 14
- Pasal 14 Ayat 3
- Pasal 14 Ayat 5
- Pasal 15
- Pasal 16
- Pasal 17
- Pasal 18
- Pasal 19
- Pasal 20
- Pasal 21
- Pasal 22
- Pasal 23
- Pasal 24
- Pasal 25
- Pasal 26
- Pasal 27
- Pasal 28
- Pasal 29
- Pasal 30
- Pasal 31
- Pasal 32
- Pasal 33
- Pasal 34
- Pasal 35
- Pasal 36
- Pasal 37
- Pasal 38
- Pasal 39
- Pasal 40
- Pasal 41
- Pasal 42
- Pasal 43
- Pasal 44
- Pasal 45
- Pasal 46
- Pasal 47
- Pasal 48
- Pasal 49
- Pasal 50
- Pasal 51
- Pasal 52
- Pasal 53
- Pasal 54
- Pasal 55
- Pasal 56
- Pasal 57
- Pasal 58
- Pasal 59
- Pasal 60
- Pasal 61
- Pasal 62
- Pasal 63
- Pasal 64
- Pasal 65
- Pasal 66
- Pasal 67
- Pasal 68
- Pasal 69
- Pasal 70
- Pasal 71
- Pasal 72
- Pasal 73
- Pasal 74
- Pasal 75
- Pasal 76
- Pasal 77
- Pasal 78
- Pasal 79
- Pasal 80
- Pasal 81
- Pasal 82
- Pasal 83
- Pasal 84
- Pasal 85
- Pasal 86
- Pasal 87
- Pasal 88
- Pasal 89
- Pasal 90
- Pasal 91
- Pasal 92
- Pasal 93
- Pasal 94
- Pasal 95
- Pasal 96
- Pasal 97
- Pasal 98
- Pasal 99
- Pasal 100

Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan

- 1. Direksi dan Komisaris
- 2. Peralihan saham
- 3. Ganti nama pemegang saham
- 4. Pengangkatan Kembali
- 5. Alamat Lengkap Perseroan

[KEMBALI](#) [LANJUTKAN](#)

Dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1) Form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri******

Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri

Nama

Persyaratan Perubahan Nama

Bukti Persetujuan Pemakaian Nama

Tempat kedudukan

Persyaratan Perubahan Tempat Kedudukan

Surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung yang dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan setempat atau surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa setempat

Maksud dan tujuan serta kegiatan

Persyaratan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

- 1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha harus sesuai dengan Nama Perseroan
- 2. Untuk kegiatan usaha khusus agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :
 - Kementerian Pariwisata
 - Kementerian ESDM
 - Kementerian Komunikasi dan Informasi
 - Kementerian Kesehatan terkait Rumah Sakit dan Apotik
 - Kementerian Perhubungan
 - Otoritas Jasa Keuangan
 - Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - Dan lain-lain

Jangka waktu

Peningkatan Modal dasar

Peringatan Perubahan Peningkatan Modal Dasar

Untuk kegiatan usaha khusus seperti Lembaga Keuangan, PMA, PT Terbuka agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pengurangan Modal dasar

Pengurangan modal ditempatkan dan disetor

- Permohonan Pengumuman Surat Kabar yang telah dilakukan 7 hari setelah RUPS
- Setelah jangka waktu 60 hari
 1. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor
 2. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor
 3. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Untuk kegiatan usaha khusus seperti Lembaga Keuangan, PMA, PT Terbuka agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk izin dari Instansi Teknis terkait seperti :
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal

Apabila ada keberatan yang tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Tidak ada keberatan
- 30 hari (setelah masa pengumuman 60 hari di surat kabar) data akan di hapus

Tanggal RUPS

Tanggal

Pengumuman Surat Kabar

Tanggal Cetak

Nama Surat Kabar

Status Perseroan

Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pada form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Persetujuan Menteri** :

1. Ceklis **Nama** jika ada perubahan pada Nama Perseroan

- Ceklis Persyaratan Perubahan Nama

2. Ceklis **Tempat Kedudukan** jika ada perubahan pada Tempat Kedudukan Perseroan

- Ceklis Persyaratan Perubahan Tempat Kedudukan

3. Ceklis **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan** jika ada perubahan pada Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan

- Ceklis Persyaratan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan

4. Ceklis **Jangka Waktu** jika ada perubahan pada Jangka Waktu Perseroan

5. Ceklis **Peningkatan Modal Dasar** jika ada Peningkatan Modal Dasar Perseroan

6. Ceklis **Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor** jika ada Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor pada Perseroan

- Ceklis Permohonan
- Ceklis Setelah jangka waktu 60 hari
- Isi tanggal RUPS
- Isi Tanggal Cetak Surat Kabar
- Isi Nama Surat Kabar

7. Ceklis **Status Perseroan** jika ada perubahan pada Status Perseroan

- Ceklis Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

2) Form ****Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan****

Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor

Peringatan Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor

1. Bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal disetor/ditempatkan Perseroan
2. Bukti lainnya selain dengan uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan
3. Bukti lainnya selain dengan uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan benda tidak bergerak ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan
4. Bilaman PMA: Harus memiliki Izin Prinsip BKPM

Jenis Perseroan

Persyaratan Perubahan Jenis Perseroan

Izin Prinsip BKPM

Pasal 1 ayat 1

Pasal 1 ayat 2

Persetujuan Dewan Komisaris

Pasal 4 ayat 1

Pasal 4 Ayat 2

- | | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 3 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 4 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 5 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 6 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 7 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 8 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 9 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 10 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 11 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 12 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 13 | <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 14 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 4 ayat 15 | | | |
| <input type="checkbox"/> Pasal 5 | <input type="checkbox"/> Pasal 6 | <input type="checkbox"/> Pasal 7 | <input type="checkbox"/> Pasal 8 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 9 | <input type="checkbox"/> Pasal 10 | <input type="checkbox"/> Pasal 11 | <input type="checkbox"/> Pasal 11 ayat 3 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 11 ayat 2.a(4) | <input type="checkbox"/> Pasal 12 | <input type="checkbox"/> Pasal 13 | <input type="checkbox"/> Pasal 14 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 14 Ayat 3 | <input type="checkbox"/> Pasal 14 Ayat 5 | <input type="checkbox"/> Pasal 15 | <input type="checkbox"/> Pasal 16 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 17 | <input type="checkbox"/> Pasal 18 | <input type="checkbox"/> Pasal 19 | <input type="checkbox"/> Pasal 20 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 21 | <input type="checkbox"/> Pasal 22 | <input type="checkbox"/> Pasal 23 | <input type="checkbox"/> Pasal 24 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 25 | <input type="checkbox"/> Pasal 26 | <input type="checkbox"/> Pasal 27 | <input type="checkbox"/> Pasal 28 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 29 | <input type="checkbox"/> Pasal 30 | <input type="checkbox"/> Pasal 31 | <input type="checkbox"/> Pasal 32 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 33 | <input type="checkbox"/> Pasal 34 | <input type="checkbox"/> Pasal 35 | <input type="checkbox"/> Pasal 36 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 37 | <input type="checkbox"/> Pasal 38 | <input type="checkbox"/> Pasal 39 | <input type="checkbox"/> Pasal 40 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 41 | <input type="checkbox"/> Pasal 42 | <input type="checkbox"/> Pasal 43 | <input type="checkbox"/> Pasal 44 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 45 | <input type="checkbox"/> Pasal 46 | <input type="checkbox"/> Pasal 47 | <input type="checkbox"/> Pasal 48 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 49 | <input type="checkbox"/> Pasal 50 | <input type="checkbox"/> Pasal 51 | <input type="checkbox"/> Pasal 52 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 53 | <input type="checkbox"/> Pasal 54 | <input type="checkbox"/> Pasal 55 | <input type="checkbox"/> Pasal 56 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 57 | <input type="checkbox"/> Pasal 58 | <input type="checkbox"/> Pasal 59 | <input type="checkbox"/> Pasal 60 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 61 | <input type="checkbox"/> Pasal 62 | <input type="checkbox"/> Pasal 63 | <input type="checkbox"/> Pasal 64 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 65 | <input type="checkbox"/> Pasal 66 | <input type="checkbox"/> Pasal 67 | <input type="checkbox"/> Pasal 68 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 69 | <input type="checkbox"/> Pasal 70 | <input type="checkbox"/> Pasal 71 | <input type="checkbox"/> Pasal 72 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 73 | <input type="checkbox"/> Pasal 74 | <input type="checkbox"/> Pasal 75 | <input type="checkbox"/> Pasal 76 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 77 | <input type="checkbox"/> Pasal 78 | <input type="checkbox"/> Pasal 79 | <input type="checkbox"/> Pasal 80 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 81 | <input type="checkbox"/> Pasal 82 | <input type="checkbox"/> Pasal 83 | <input type="checkbox"/> Pasal 84 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 85 | <input type="checkbox"/> Pasal 86 | <input type="checkbox"/> Pasal 87 | <input type="checkbox"/> Pasal 88 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 89 | <input type="checkbox"/> Pasal 90 | <input type="checkbox"/> Pasal 91 | <input type="checkbox"/> Pasal 92 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 93 | <input type="checkbox"/> Pasal 94 | <input type="checkbox"/> Pasal 95 | <input type="checkbox"/> Pasal 96 |
| <input type="checkbox"/> Pasal 97 | <input type="checkbox"/> Pasal 98 | <input type="checkbox"/> Pasal 99 | <input type="checkbox"/> Pasal 100 |

Pada form **Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan** :

1. Ceklis **Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor** jika ada Peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan
2. Ceklis **Jenis Perseroan** jika ada perubahan pada Jenis Perseroan
 - Ceklis Persyaratan Perubahan Jenis Perseroan
3. Ceklis **Pasal** yang mengatur Perubahan Anggaran Dasar dengan Pemberitahuan

3) form **Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan**

Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan

1. Direksi dan Komisaris

Peringatan Perubahan Data Perseroan

Mohon untuk diperhatikan bahwa untuk beberapa jenis usaha memerlukan Persetujuan tertentu dari Instansi lain. Seperti:

- Fit and Proper Test untuk Jenis Usaha Bank dan Jasa Keuangan
- Izin ESDM untuk Perseroan yang menjalankan Kontrak Karya
- Untuk Jenis Usaha lainnya mohon untuk diperhatikan dan di koordinasikan dengan Instansi lain

2. Peralihan saham

Persyaratan Perubahan Peralihan Saham

Bilamana Perseroan dengan status PMA, izin prinsip BKPM

Bilamana PT Tertutup, Akta pemindahan Hak atas Saham

Bilamana PT Tertutup, Daftar Pemegang Saham

3. Ganti nama pemegang saham

4. Pengangkatan Kembali

5. Alamat Lengkap Perseroan

Persyaratan Perubahan Lengkap Perseroan

Surat keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat

KEMBALI

LANJUTKAN

Pada form **Perubahan Data Perseroan dengan Pemberitahuan** :

1. Ceklis **Direksi dan Komisaris** jika ada perubahan data Direksi dan Komisaris Perseroan
2. Ceklis **Peralihan Saham** jika ada perubahan Peralihan Saham Perseroan
3. Ceklis **Ganti Nama Pemegang Saham** jika ada perubahan Nama Pemegang Saham Perseroan
4. Ceklis **Alamat Lengkap Perseroan** jika ada perubahan Alamat Lengkap Perseroan

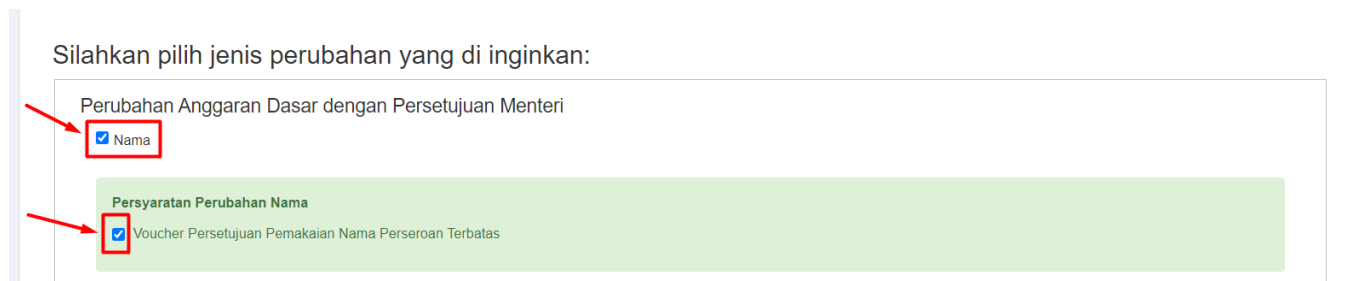
- Ceklis Persyaratan Perubahan Lengkap perseroan
- Klik tombol **LANJUTKAN** maka akan keluar alert perhatian!!!



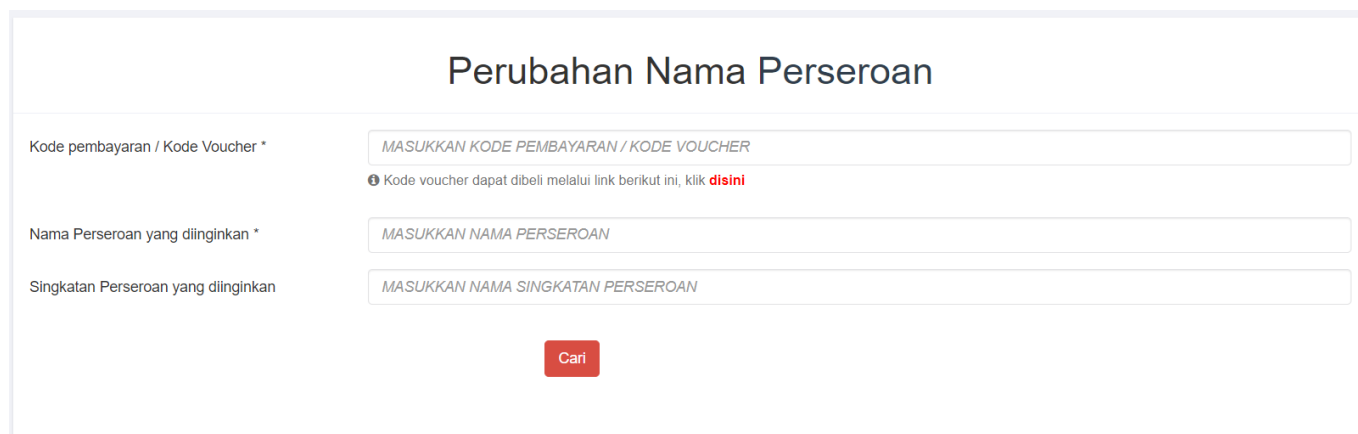
- Klik tombol **Saya Yakin** untuk melanjutkan

4) Perubahan Nama Perseroan

- Jika Pilihan Jenis Perubahan pada **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar** yang dicentang **Nama** maka wajib centang persyaratan memiliki **Voucher Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas**, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :



- Setelah pemilihan jenis perseroan, maka sistem akan menampilkan halaman **Perubahan Nama Perseroan**, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :



- Klik **disini** untuk melakukan pembelian voucher **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar**

Perseroan

- Kemudian tampil form **Pemesanan Nomor Voucher Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas**, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM * Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

NAMA PEMOHON *

EMAIL PEMOHON *

NOMOR HP *

Pembelian voucher sebesar Rp 100.000. Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.

Apabila proses tidak di lanjutkan maka PPNB yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan

Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

BELI

- Ceklis *disclaimer* dan klik tombol **BELI**, lalu tampil form **Bukti Pemesanan Nomor Voucher**

DITJEN AHU ONLINE Pesan PEMBAYARAN PNPB SECARA ONLINE SABH

BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER

BADAN HUKUM

Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

KODE VOUCHER	:	-
BILL ID ⁽¹⁾	:	00000000000000000000000000000000
NAMA PEMOHON	:	PT. BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER
NOMOR REKENING	:	00000000000000000000000000000000
EMAIL PEMOHON	:	00000000000000000000000000000000
NOMOR HP	:	00000000000000000000000000000000
TANGGAL TRANSAKSI	:	11 September 2021 11:00:00
TANGGAL EXPIRED	:	11 September 2021 11:00:00
(PEMBAYARAN TERAKHIR) TAGIHAN	:	Rp 100.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	BELUM BAYAR

* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Download **Kirim Ulang**

- Setelah itu lakukan pembayaran tagihan pemesanan nomor voucher pada aplikasi YAP!. Seperti yang dijelaskan pada point **Pembayaran Nomor Voucher**

- Jika tagihan sudah terbayar, klik tombol **List Voucher**, maka akan tampil halaman **Daftar Voucher**

Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi: Dari Sampai

Kode Voucher/Bill ID:

Pelayanan Jasa Hukum:

Status:

Cari

*** Keterangan :**

1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU

Menampilkan 1-10 dari 460 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID ^[1]	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas	<input type="text"/>	Rp. 100.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi

- Klik **Lanjutkan Transaksi** untuk menampilkan halaman **Permohonan Perubahan Nama Perseroan** dengan nomor voucher yang sudah dipesan

Perubahan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher *

📌 Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

Nama Perseroan yang diinginkan *

Singkatan Perseroan yang diinginkan

Cari

- Kemudian masukkan **Kode pembayaran/Kode Voucher, Nama Perseroan yang diinginkan.**
- Lalu klik tombol **Cari**
- Jika **Nama Perseroan yang diinginkan** sudah ada, maka akan muncul notifikasi seperti berikut:

Nama Perseroan yang diinginkan *

Singkatan Perseroan yang diinginkan

Cari

⚠ Perseroan "INDONESIA TANAH AIRKU" sudah ada dalam database SABH silahkan cari nama yang lain.

- Jika **Nama Perseroan yang diinginkan** tidak ada, maka sistem akan memuat halaman Cek Nama Perseroan berisi informasi nama perseroan yang telah dipesan dan daftar nama perseroan yang mirip.

SAYA YAKIN DAN LANJUTKAN

- Checklist pernyataan dibawah halaman dan Klik tombol **SAYA YAKIN DAN LANJUTKAN** untuk melanjutkan Pemesanan Nama Perseroan.

*Nama Perseroan yang Anda pilih adalah [REDACTED]
*Harap Anda periksa kembali sebelum melanjutkan.

Untuk diperhatikan!
Terdapat kemiripan nama [REDACTED] dengan nama yang ada pada database AHU (lihat pada tabel dibawah)

No.	Nama Perseroan Terbatas yang telah terdaftar	Status
1	[REDACTED]	terdaftar
2	[REDACTED]	terdaftar
3	[REDACTED]	terdaftar
4	[REDACTED]	terdaftar
5	[REDACTED]	terdaftar
6	[REDACTED]	terdaftar
7	[REDACTED]	terdaftar
8	[REDACTED]	terdaftar
9	[REDACTED]	terdaftar
10	[REDACTED]	antrian

Saya menyatakan apabila nama yang digunakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka saya bersedia mengganti nama tersebut atau pendaftaran badan hukum yang menggunakan nama tersebut dapat dibatalkan oleh Menteri.

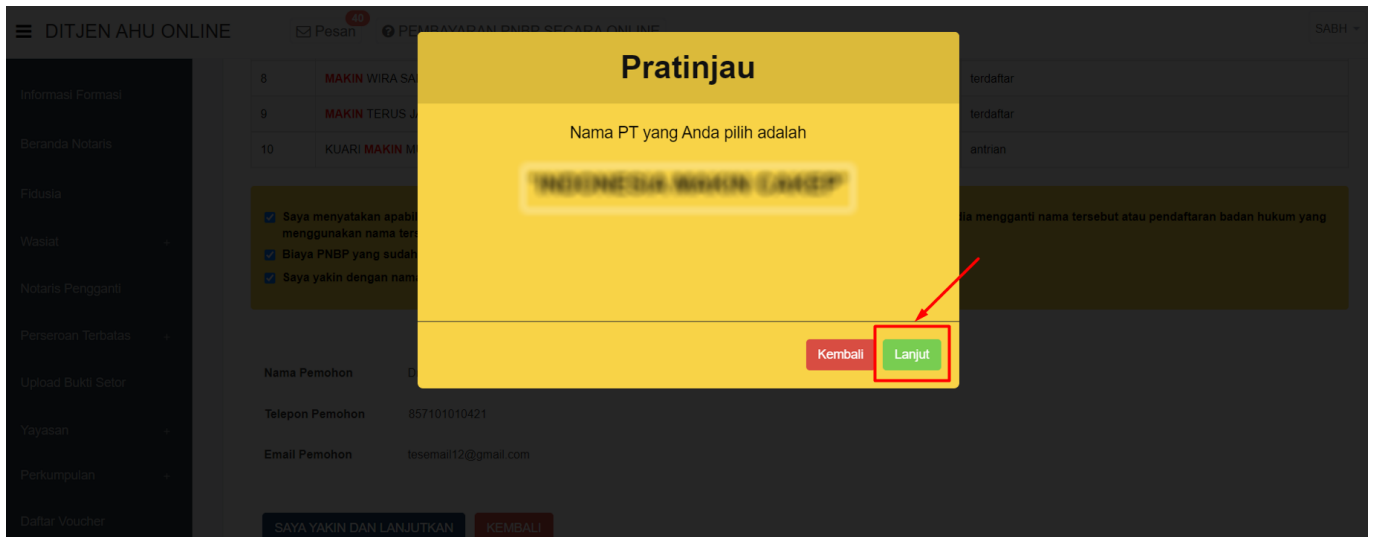
Biaya PNBPN yang sudah digunakan tidak dapat diminta kembali.

Saya yakin dengan nama yang saya gunakan dan saya mengetahui tidak dapat mengubah nama setelah tahapan ini.

Nama Pemohon: [REDACTED]
Telepon Pemohon: [REDACTED]
Email Pemohon: [REDACTED]

SAYA YAKIN DAN LANJUTKAN **KEMBALI**

- Maka akan keluar **Popup Disclaimer**, seperti berikut. Kemudian klik **Lanjut**



g. Form isian data Perseroan

- Kemudian akan masuk ke form isian data perseroan
- Pemohon dapat melakukan perubahan sesuai data yang terbuka
- data dapat diubah/terbuka sesuai dengan pilihan perubahan

≡ DITJEN AHU ONLINE
PEMBAYARAN PNBP SECARA ONLINE
SABH

Format Isian Perubahan Perseroan Terbatas

Kotak isian yang berlatas * wajib diisi

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan	PPKM LAGI PPKM LAGI
Nama Singkatan	PPKM LAGI PPKM LAGI
Jenis Perseroan	SWASTA NASIONAL
NPWP Perseroan *	123123
Jangka Waktu Perseroan	TIDAK TERBATAS
Status Perseroan	terlupa

KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi	DKI JAKARTA	Kabupaten	KEPULAUAN SERIBU
----------	-------------	-----------	------------------

DOMISILI PERSEROAN

Alamat Perseroan			
RT	01	RW	09
Kecamatan	KEPULAUAN SERIBU UTARA	Kelurahan	PULAU HARAPAN
Kode Pos	14540	Nomor Telepon	081232412414

Maksud dan Tujuan

Tambah Data

Data KBLU Tahun: 2020

No	Kode KBLU	Judul KBLU	Uraian KBLU	Aksi
1	01111	Pertanian Jagung	Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.	B
2	01112	Pertanian Gandum	Kelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal/gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman gandum.	B
3	01220	Pertanian Buah	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan persiapan/pelebaran, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti: jambu, durian, durian, durian, durian dan pisang raja, kumara, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, kangkung, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirihak, buah naga dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.	B

AKTA NOTARIS

Nama Notaris	Dr. NOTARIS SABH JR S.H., S.E., M.Kn.		
Nomor Akta	12345678	Tanggal Akta	19-08-2021

MODAL DASAR *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 100	10.000	Rp. 1.000.000

Total modal dasar Rp. 1.000.000

MODAL DITEMPATKAN *

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 100	5.000	Rp. 500.000

Total modal ditempatkan Rp. 500.000

MODAL DISETOR *

500.000

Dalam bentuk uang

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM *

Tambah Data

Penanggung Jawab	Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total	Aksi
Ya	satura	Tanpa Klasifikasi	2.500	KOMISARIS	Rp. 250.000	Perbaharu Hapus
Idak	ahmad	Tanpa Klasifikasi	2.500	DIREKTUR	Rp. 250.000	Perbaharu Hapus

TOTAL LEMBAR SAHAM 5.000
TOTAL MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR Rp 500.000

Pemilik Manfaat

* Wajib Disi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui korporasi, menerapkan kewajiban pelaporan pemilik manfaat, sesuai ketentuan:

- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2019 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 (Unduh)

Saya mengerti, memahami dan bersedia melaksanakan sebagaimana ketentuan mengenai pelaporan pemilik manfaat pada korporasi.

Notaris Pengganti

Apakah Anda Notaris Pen...

PERSYARATAN

Sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, Saya menyatakan :

- 1. Bahwa Data yang diisi pada format isian pendirian Perseroan sudah benar.
- 2. Bahwa Akta Perseroan yang saya buat sebelum mengisi format isian pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Bahwa Data Perseroan yang diisi dengan dokumen fisik yang disimpan pada kantor saya telah sesuai.
- 4. Bahwa dokumen-dokumen untuk pendirian Perseroan telah lengkap sebelum saya mengisi format isian pendirian Perseroan.
- 5. Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi pidana, perdata dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEMBALI
LANJUTKAN

h. Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui korporasi, menerapkan kewajiban pelaporan pemilik manfaat, sesuai ketentuan:

- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 (Unduh)

Saya mengerti, memahami dan bersedia melaksanakan sebagaimana ketentuan mengenai pelaporan pemilik manfaat pada korporasi.

• Ceklis pada kolom centang yang ada. Maka akan muncul tampilan seperti berikut:

1. Jika data **Pemilik Manfaat** sudah ada pada transaksi sebelumnya seperti pada gambar dibawah ini. Maka pemohon dapat langsung melanjutkan transaksinya. Jika ingin melakukan perubahan/pengkinian data, dapat di lakukan melalui [Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi](#)

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui korporasi, menerapkan kewajiban pelaporan pemilik manfaat, sesuai ketentuan:

- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 (Unduh)

Saya mengerti, memahami dan bersedia melaksanakan sebagaimana ketentuan mengenai pelaporan pemilik manfaat pada korporasi.

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan
Wahyuni, Nur Hafidha	9102010010000	199801010001	WNI	Jl. Tugu Pahlawan No. 17, Blok C-20, Komplek	9102010010000	Pemegang saham dan Direktur Utama Perseroan
Wahyuni, Nur Hafidha	9102010010000	199801010001	WNI	Jl. Tugu Pahlawan No. 17, Blok C-20, Komplek	9102010010000	Pemegang Saham
Wahyuni, Nur Hafidha	9102010010000	199801010001	WNI	Jl. Tugu Pahlawan No. 17, Blok C-20, Komplek	9102010010000	Pemegang saham dan Direktur Perseroan

Untuk melakukan pelaporan perubahan atau pengkinian data pemilik manfaat korporasi dapat dilakukan melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Owner Application) atau melalui tautan berikut <http://bo.ahu.go.id>

2. Jika data **Pemilik Manfaat** belum ada isi sebelumnya, maka pemohon wajib mengisi data, sesuai tahapan berikut ini:

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui korporasi, menerapkan kewajiban pelaporan pemilik manfaat, sesuai ketentuan:

- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 (Unduh)

Saya mengerti, memahami dan bersedia melaksanakan sebagaimana ketentuan mengenai pelaporan pemilik manfaat pada korporasi.

[Tambah Data](#)

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

• Untuk mengisi data Pemilik Manfaat, pengguna dapat langsung Klik tombol [Tambah Data](#). Maka akan muncul Form Tambah Pemilik Manfaat seperti berikut.


Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

[KEMBALI](#) [OK](#)

- Kemudian Pengguna dapat memilih kriteria pemilik manfaatnya, dalam hal ini jika sudah memilih kriteria antara a/b/c/d maka tidak dapat memilih e/f/g, begitu pula sebaliknya.

- Setelah memilih kriteria, Klik tombol  untuk melakukan pengisian data pemilik manfaatnya.
- Kemudian isikan data pemilik manfaat pada form dibawah ini. Setelah semua field terisi, Klik tombol



Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

KEMBALI **OK**

Data Pemilik Manfaat :

Nama Lengkap *
andip

Jenis Identitas *
 NIK SIM Paspor

Nomor Identitas *
1234567891011123456

Tempat Lahir * **Tanggal Lahir ***
Bandung 15-08-2002

Kewarganegaraan *
 WNI WNA

Provinsi * **Kabupaten ***
JAWA BARAT KOTA BANDUNG

Kecamatan * **Kelurahan ***
SUKANDI SUKAGALIH

Rt **Rw**
001 002

Alamat sesuai kartu identitas *
Bandung

NPWP *
1234567890123456789012345678901234

Hubungan Antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat *
Pemegang Saham

Notaris wajib memiliki berkas dokumen data dari pemilik manfaat tersebut.

SIMPAN

- Data yang telah di isikan, akan tampil pada tabel seperti berikut ini:

Pemilik Manfaat

* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui korporasi, menerapkan kewajiban pelaporan pemilik manfaat, sesuai ketentuan:

- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 (Unduh)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 (Unduh)

Saya mengerti, memahami dan bersedia melaksanakan sebagaimana ketentuan mengenai pelaporan pemilik manfaat pada korporasi.

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
...	WNI	Bandung	Edit Hapus

i. Persyaratan

Notaris Pengganti

Apakah Anda Notaris Pengganti?

PERSYARATAN

Sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, Saya menyatakan :

1. Bahwa Data yang diisi pada format isian pendirian Perseroan sudah benar.
2. Bahwa Akta Perseroan yang saya buat sebelum mengisi format isian pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Data Perseroan yang diisi dengan dokumen fisik yang disimpan pada kantor saya telah sesuai.
4. Bahwa dokumen-dokumen untuk pendirian Perseroan telah lengkap sebelum saya mengisi format isian pendirian Perseroan.
5. Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi pidana, perdata dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEMBALI **LANJUTKAN**

- Ubah data sesuai dengan kebutuhan, setelah itu ceklis persyaratan dan klik tombol Lanjutkan. Kemudian akan tampil pop up Perhatian!!!



Perhatian!!!

Saya, notaris **[REDACTED]** yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya.
- Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Siap bertanggung jawab dan menerima segala bentuk sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengetahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM tidak bertanggung jawab terhadap isian data yang Saya sampaikan.

Dengan mengklik tombol setuju, Anda telah memperhatikan dan menyetujui serta siap melaksanakan peringatan ini.

Tidak Setuju

Setuju

1. Ceklis semua poin Pernyataan
 2. Klik tombol **Setuju**
- Selanjutnya akan tampil pop up Surat Pernyataan


Surat Pernyataan

- 1. Bahwa saya telah mengetahui data terakhir sebagaimana yang tersimpan pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 2. Bahwa saya telah membaca dengan cermat serta mengetahui seluruh susunan pemegang saham dan pengurus yang sah berdasarkan data yang tersimpan pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 3. Bahwa untuk perubahan yang dilakukan, telah menghadap kepada saya dan saya mengetahui pemegang saham yang sah atau secara sah mewakili mereka, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas.
- 4. Bahwa bila dikemudian hari, diketahui penghadap bukan pemegang saham yang sah atau bukan mewakili pemegang saham yang sah maka saya menyetujui data yang ada pada database di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai data terakhir sebelum perubahan yang saya lakukan.
- 5. Bahwa dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap bertanggung jawab penuh dan saya menandatangani secara sah pernyataan ini.

Dengan mengklik tombol setuju Anda telah menandatangani pernyataan ini secara elektronik.

Tidak Setuju

Setuju

1. Ceklis semua poin Surat Pernyataan
2. Klik tombol 

j. Halaman Pratinjau Data isian Perubahan

- Kemudian tampil halaman **Pra Tinjau Perubahan Data Perseroan**

PRA TINJAU PERUBAHAN DATA PERSEROAN

JENIS PERSEROAN : PMA

DATA PERSEROAN

NAMA PERSEROAN :

NPWP PERSEROAN :

JANGKA WAKTU :

KEDUDUKAN :

KECAMATAN :

ALAMAT :

RT : RW :

KODE POST : NOMOR TELEPON :

MAKSUD DAN TUJUAN

NO	KODE KBLI	JUDUL KBLI	URAIAN KBLI
1	01111	PERTANIAN JAGUNG	KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PERTANIAN KOMODITAS JAGUNG MULAI DARI KEGIATAN PENGOLAHAN LAHAN, PENANAMAN, PEMELIHARAAN, DAN JUGA PEMANENAN DAN PASCA PANEN JIKA MENJADI SATU KESATUAN KEGIATAN TANAMAN JAGUNG. TERMASUK KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PEMBENIHAN TANAMAN JAGUNG.
2	01112	PERTANIAN GANDUM	KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PERTANIAN GANDUM MULAI DARI KEGIATAN PENGOLAHAN LAHAN, PENANAMAN, PEMELIHARAAN, DAN JUGA PEMANENAN DAN PASCA PANEN JIKA MENJADI SATU KESATUAN KEGIATAN TANAMAN SEREALIA GANDUM, SEPERTI SORGUM/CANTEL, GANDUM (WHEAT/OATS), JELAI (BARLEY), GANDUM HITAM (RYE), JAWAWUT (MILLET) DAN SEJENISNYA. TERMASUK KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PEMBENIHAN TANAMAN GANDUM.
3	01113	PERTANIAN KEDELAI	KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PERTANIAN KEDELAI MULAI DARI KEGIATAN PENGOLAHAN LAHAN, PENANAMAN, PEMELIHARAAN, DAN JUGA PEMANENAN DAN PASCA PANEN JIKA MENJADI SATU KESATUAN KEGIATAN TANAMAN KEDELAI (KACANG PALAWIJA). TERMASUK KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PEMBENIHAN TANAMAN KEDELAI.
4	01114	PERTANIAN KACANG TANAH	KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PERTANIAN KACANG TANAH MULAI DARI KEGIATAN PENGOLAHAN LAHAN, PENANAMAN, PEMELIHARAAN, DAN JUGA PEMANENAN DAN PASCA PANEN JIKA MENJADI SATU KESATUAN KEGIATAN TANAMAN KACANG TANAH (KACANG PALAWIJA). TERMASUK KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PEMBENIHAN TANAMAN KACANG TANAH.
5	01115	PERTANIAN KACANG HIJAU	KELOMPOK INI MENCAKUP USAHA PERTANIAN KACANG HIJAU MULAI DARI KEGIATAN PENGOLAHAN LAHAN, PENANAMAN, PEMELIHARAAN, DAN JUGA PEMANENAN DAN PASCA PANEN JIKA MENJADI SATU KESATUAN KEGIATAN TANAMAN KACANG HIJAU (KACANG PALAWIJA). TERMASUK KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PEMBENIHAN TANAMAN KACANG HIJAU.

AKTA NOTARIS

NO. AKTA : TANGGAL AKTA :

Modal Dasar

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Saham (Lembar)	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000.000	100	Rp. 100.000.000

Modal Ditempatkan

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Saham (Lembar)	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 1.000.000	100	Rp. 100.000.000

MODAL DISETOR : RP. 100.000.000

LAINNYA : N/A

Pengurus dan Pemegang Saham

Penanggung Jawab	Nama	Modal Ditempatkan	Lembar Saham	Jabatan	Total
YA	<input type="text"/>	TANPA KLASIFIKASI	50	KOMISARIS	RP. 50.000.000
TIDAK	<input type="text"/>	TANPA KLASIFIKASI	50	DIREKTUR	RP. 50.000.000

JENIS PERUBAHAN : **PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

: - JENIS PERSEROAN

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

- GANTI NAMA PEMEGANG SAHAM

KEMBALI

SAYA YAKIN

1. Klik tombol **Kembali** jika data belum sesuai.
2. Klik tombol **SAYA YAKIN** , maka akan tampil daftar transaksi perseroan

k. Daftar Transaksi Perseroan, Masa Pratinjau dan Upload Akta

Setelah itu tampil Halaman **Daftar Transaksi Perseroan**

Paling lambat **30 (tiga puluh) hari** setelah transaksi selesai, Notaris diwajibkan unggah Akta. Jika Notaris tidak melakukan unggah akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, transaksi otomatis akan terhapus oleh sistem dan voucher PNBPN tidak dapat digunakan kembali.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan ke PNRI untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI.

Sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, batas waktu pengiriman salinan SK dan/atau SP untuk keperluan TBN adalah paling lambat 14 hari sejak diterbitkannya SK dan/atau SP.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

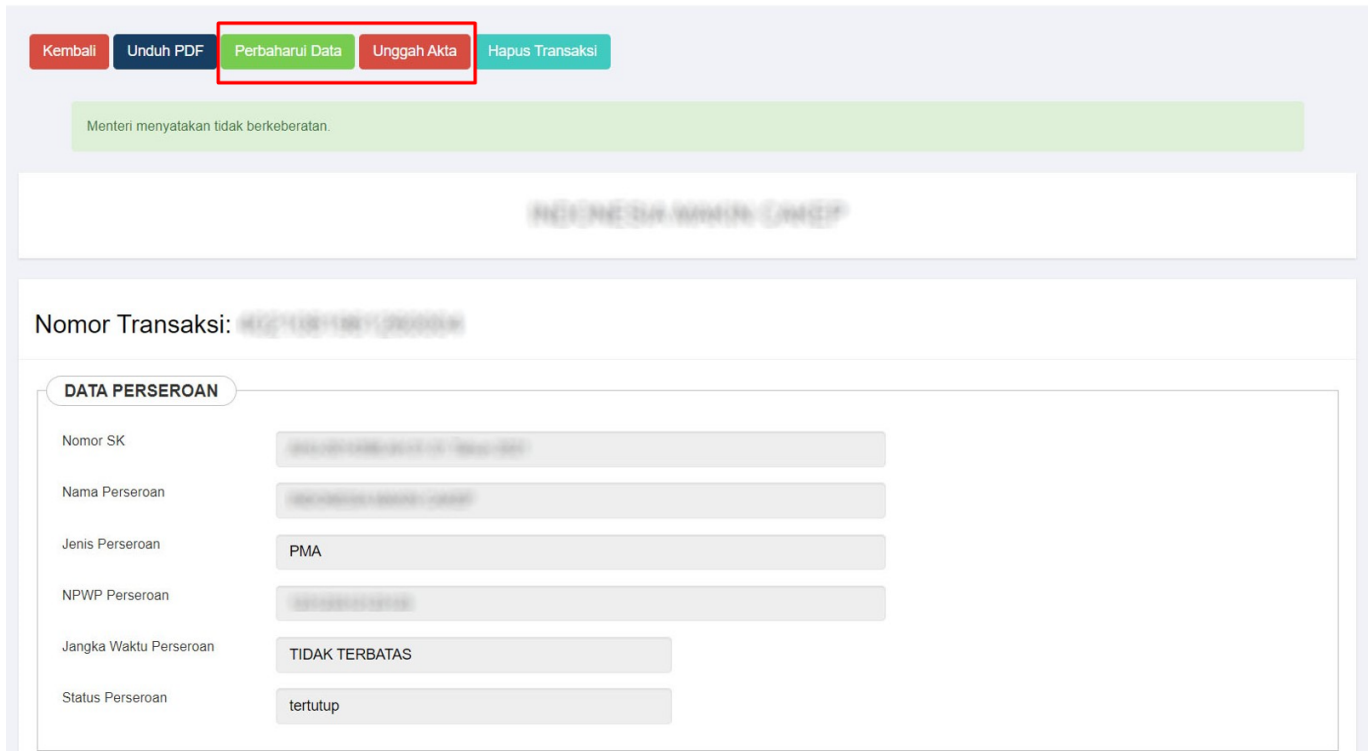
Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

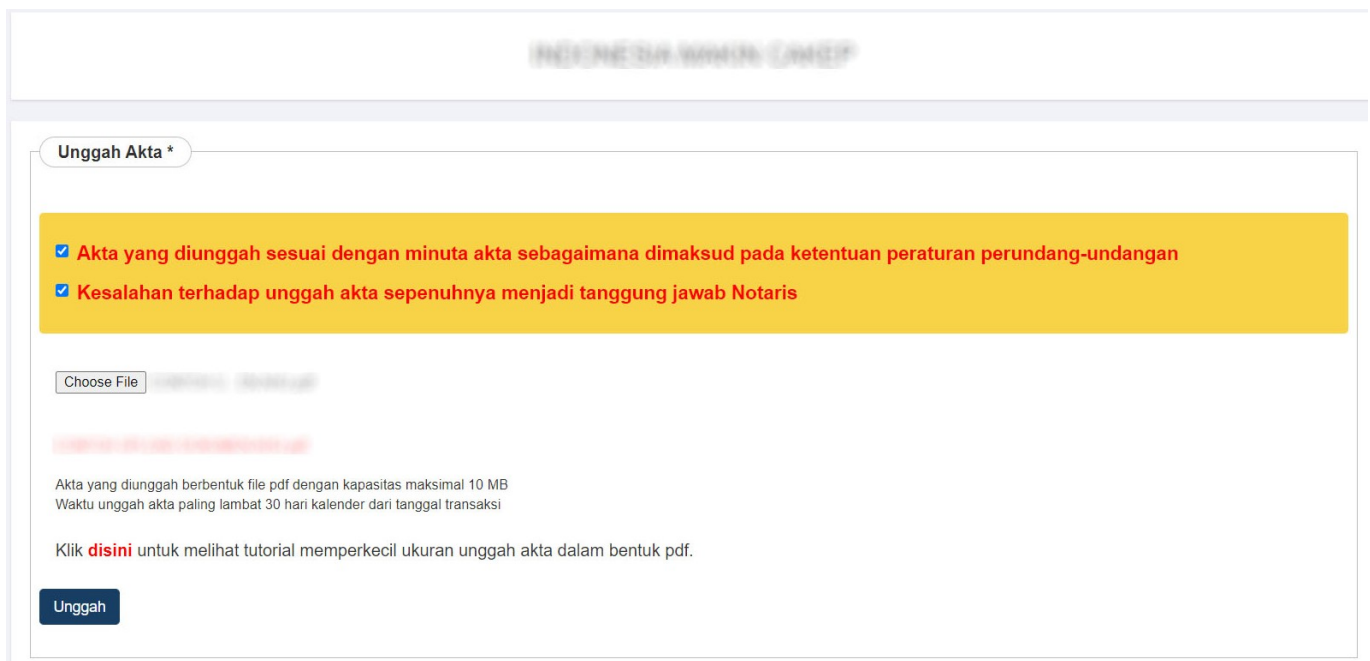
No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			PERUBAHAN	PMA	INDONESIA MAKIN CAKEP	SUDAH BAYAR		Pratinjau & Cetak SK/SP Waktu Upload : 30 hari Tanggal Jatuh Tempo : Sisa Pratinjau : 7 hari Tanggal Habis Pratinjau :

1. Tombol **Pratinjau & Cetak SK/SP** untuk melihat data perubahan. **PRATINJAU AKAN BERLAKU SELAMA 7 HARI**

2. Untuk mengakses form Pratinjau, klik **Pratinjau & Cetak SK/SP** , maka akan tampil halaman pratinjau data perseroan.



1. Klik tombol **Perbaharui Data** jika masih ada perubahan data/Edit data
2. Jika sudah tidak ada perubahan data/Edit Klik tombol **Unggah Akta** maka akan masuk ke halaman upload akta.



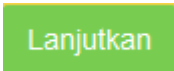
1. Ceklis semua pernyataan diatas.
2. Klik tombol **Choose Files** lalu cari file akta yang akan di upload.
3. Klik tombol **Unggah** maka akan tampil pop up preview seperti gambar dibawah ini.

PASTIKAN AKTA YANG DI UNGGAH SUDAH BENAR!



Terhadap akta yang sudah di unggah, tidak dapat dilakukan perbaikan
APAKAH AKTA YANG DI UNGGAH SUDAH BENAR ?

Lanjutkan

- Klik tombol  setelah itu akan tampil halaman dibawah ini:

PASTIKAN AKTA YANG DI UNGGAH SUDAH BENAR!

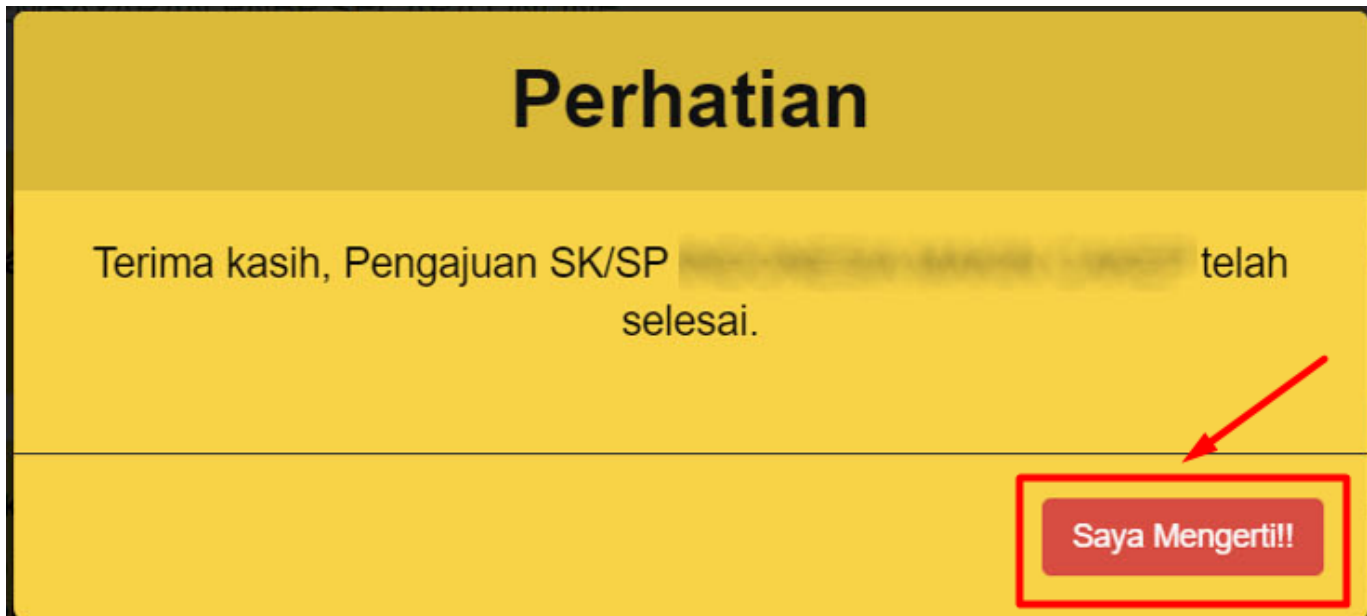


Terhadap akta yang sudah di unggah, tidak dapat dilakukan perbaikan
APAKAH AKTA YANG DI UNGGAH SUDAH BENAR ?

Kembali

Lanjutkan

- Klik tombol **Lanjutkan** setelah itu akan tampil maka akan tampil pop up :



- Setelah klik tombol [Saya Mengerti](#), maka tampil halaman **Daftar Transaksi Perseroan**.

Paling lambat **30 (tiga puluh) hari** setelah transaksi selesai, Notaris diwajibkan unggah Akta. Jika Notaris tidak melakukan unggah akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, transaksi otomatis akan terhapus oleh sistem dan voucher PNBPN tidak dapat digunakan kembali.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan ke PNRI untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI.

Sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, batas waktu pengiriman salinan SK dan/atau SP untuk keperluan TBN adalah paling lambat 14 hari sejak diterbitkannya SK dan/atau SP.

Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1	[redacted]	[redacted]	Perubahan	PMA	[redacted]	SUDAH BAYAR	[redacted]	SK Perubahan SP Perubahan Anggaran Dasar SP Perubahan Data Perseroan Download Akta Waktu Perbaikan : 89 hari

I. OUTPUT HASIL PERUBAHAN

Terdapat beberapa SK & SP Perubahan Perseroan yang dapat di download, yaitu :

1. SK Perubahan

- Klik [SK Perubahan](#) untuk mendownload SK Perubahan Perseroan.

Paling lambat **30 (tiga puluh) hari** setelah transaksi selesai, Notaris diwajibkan unggah Akta. Jika Notaris tidak melakukan unggah akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, transaksi otomatis akan terhapus oleh sistem dan voucher PNBPN tidak dapat digunakan kembali.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan ke PNRI untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI.
Sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, batas waktu pengiriman salinan SK dan/atau SP untuk keperluan TBN adalah paling lambat 14 hari sejak diterbitkannya SK dan/atau SP.
Alamat PNRI :
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMA		SUDAH BAYAR		SK Perubahan SP Perubahan Anggaran Dasar SP Perubahan Data Perseroan Download Akta Waktu Perbaikan : 89 hari

- Kemudian tampil **SK Perubahan Perseroan** seperti gambar dibawah ini.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [REDACTED]
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT [REDACTED]**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris [REDACTED] sesuai salinan akta nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] tentang Perubahan Anggaran Dasar PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED] tanggal [REDACTED] dengan Nomor Pendaftaran [REDACTED] telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED];

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED] - dengan NPWP [REDACTED] yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh Notaris [REDACTED] yang berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED] TANGGAL [REDACTED]



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR [REDACTED]
 TENTANG
 PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
 PT [REDACTED]**

- 1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000
- 2. Modal Ditempatkan : Rp. 4.000.000
- 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
[REDACTED]	DIREKTUR	-	1.000	Rp. 1.000.000
[REDACTED]	KOMISARIS	-	500	Rp. 500.000
PT [REDACTED]	BADAN HUKUM	-	1.000	Rp. 1.000.000
MASYARAKAT	-	-	300	Rp. 300.000
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	-	-	500	Rp. 500.000
PEMERINTAH	-	-	700	Rp. 700.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED] TANGGAL [REDACTED]



2. SP Perubahan Anggaran Dasar

- Klik [SP Perubahan Anggaran Dasar](#) untuk mendownload SP Perubahan Anggaran Dasar.

Paling lambat **30 (tiga puluh) hari** setelah transaksi selesai, Notaris diwajibkan unggah Akta. Jika Notaris tidak melakukan unggah akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, transaksi otomatis akan terhapus oleh sistem dan voucher PNBPN tidak dapat digunakan kembali.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan ke PNRI untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI.

Sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, batas waktu pengiriman salinan SK dan/atau SP untuk keperluan TBN adalah paling lambat 14 hari sejak diterbitkannya SK dan/atau SP.

Alamat PNRI :

Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560

Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMA		SUDAH BAYAR		SK Perubahan SP Perubahan Anggaran Dasar SP Perubahan Data Perseroan Download Akta Waktu Perbaikan : 89 hari

- Kemudian tampil **SP Perubahan Anggaran Dasar** seperti gambar dibawah ini.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : [REDACTED] Kepada Yth.
Lampiran : Notaris [REDACTED]
Perihal : **Penerimaan Pemberitahuan**
Perubahan Anggaran Dasar
PT [REDACTED] Jl. Kerajinan
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh Notaris [REDACTED], berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal [REDACTED], mengenai perubahan Jenis Perseroan, **PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED]**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]
DAFTAR PERSEROAN [REDACTED] TANGGAL [REDACTED]
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

3. SP Perubahan Data Perseroan

- Klik [SP Perubahan Data Perseroan](#) untuk mendownload **SP Perubahan Data Perseroan**.

Paling lambat **30 (tiga puluh) hari** setelah transaksi selesai, Notaris diwajibkan unggah Akta. Jika Notaris tidak melakukan unggah akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, transaksi otomatis akan terhapus oleh sistem dan voucher PNBPN tidak dapat digunakan kembali.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan ke PNRI untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI.
Sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, batas waktu pengiriman salinan SK dan/atau SP untuk keperluan TBN adalah paling lambat 14 hari sejak diterbitkannya SK dan/atau SP.
Alamat PNRI :
JI.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Perubahan	PMA		SUDAH BAYAR		SK Perubahan SP Perubahan Anggaran Dasar SP Perubahan Data Perseroan Download Akta Waktu Perbaikan : 89 hari

- Kemudian tampil **SP Perubahan Data Perseroan** seperti gambar dibawah ini.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : [REDACTED] Kepada Yth.
Lampiran : Notaris [REDACTED]
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT [REDACTED]
Jl. Kerajinan
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh Notaris [REDACTED], berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT [REDACTED] disingkat PT [REDACTED]**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED] TANGGAL [REDACTED]
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

From:
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan_perubahan_perseroan

Last update: **2021/09/10 03:38**